

BAB III

DINAMIKA KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS YERUSALEM DAN POSISI AMERIKA SEBAGAI JURU DAMAI KONFLIK ISRAEL- PALESTINA

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat atas Palestina dan Israel, dan Kebijakan atas Kota Yerusalem itu sendiri. Kemudian peneliti akan menjelaskan panjang lebar *standing* Amerika sebagai *Peace Broker* atas konflik Israel Palestina . Serta penulis menjabarkan berbagai resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan Yerusalem

Dalam Politik Luar Negeri suatu negara-bangsa tentu memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing, karena berbagai kebijakan yang dibuat tentu hasil dari proses panjang dengan negosiasi, diskusi dan RUU yang mewajibkan suatu negara tertentu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk negara *Super Power* seperti Amerika Serikat juga memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain terutama negara-negara berkembang yang tentu mereka kurang defensif dibandingkan negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat yang punya segalanya dan bisa memengaruhi siapapun. Kalau dicermati, kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki 6 macam pola, dan keenam pola tersebut satu sama lain saling bersinergi tapi kadang saling bertentangan. Keenam pola politik luar negeri Amerika Serikat tersebut adalah: Isolasionis, Ekspansionis, Netral, Intervensi, Pramatisme, dan Realisme.

Pola pertama adalah Isolasionis, hal ini merupakan sikap yang dimunculkan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Mulai berlaku pada masa awal penerapan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang merasa besar (*Great Power*) terhadap negara-negara lemah di luar Eropa sendiri. Sifat isolasionis Amerika Serikat dikembangkan lebih lanjut oleh James Monroe pada tahun 1823, dengan alasan mengusir perserikatan besar. Akhirnya Amerika Serikat tampil dalam bentuk intervensi di Amerika. Tapi tujuannya untuk menolong Amerika dari ancaman, karena posisi Amerika Serikat pada saat itu sebagai pembela Amerika sendiri. Tindakan ini sekaligus mengumumkan doktrin Monroe yang akhirnya menjadi termasyhur pada saat itu dengan semboyannya "*American for the American,*" (Soebantardjo, 1961, p. 139).

Pola berikutnya adalah Ekspansi, pola ini sangat bertolak belakang dengan pola yang pertama, isolasionis. Awal mula terjadinya pergeseran ini karena Amerika Serikat secara lambat laun juga mengikuti arus perkembangan dari Barat yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Amerika Serikat mencoba mengembangkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dalam negerinya, yakni berkeinginan menguasai seluruh benua Amerika. Keinginan tersebut terbukti dengan adanya perang AS-Meksiko (Perkin, 1956, p. 13).

Pola selanjutnya adalah Netral. Timbulnya perang besar dalam sejarah abad ke-20 telah memberi warna baru dalam konstelasi perpolitikan di Amerika Serikat, terutama politik luar negerinya. Peperangan yang terjadi pada waktu itu sangat mengkhawatirkan seluruh dunia, tapi tidak memengaruhi Amerika Serikat agar melibatkan diri dalam peperangan. Dalam rangka mengantisipasi, Amerika Serikat mengambil tindakan kebijaksanaan, yakni sikap netral yang dimanifestasikan dalam berbagai kebijaksanaan. Dan pada

perkembangannya, Amerika Serikat memakai pola intervensi, yaitu kebijakan yang bersifat campur tangan dalam berbagai urusan, baik masalah internasional, masalah regional, ataupun masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin besar pada periode setelah Perang Dunia II, bahkan pada saat sekarang ini. Politik intervensi ini dilakukan Amerika Serikat secara terang-terangan tanpa mengindahkan norma-norma dalam negerinya, Negara lain, dan peradilan yang berlaku dalam hubungan internasional. Politik intervensi bagi Amerika Serikat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dalam bentuk nyata. Setiap tindakan yang dilakukan harus bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya sendiri, dan Amerika Serikat sering menggunakan jalan pintas atau jalan menikung dalam mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Kemudian kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektik antara dua pola yang berlawanan: pragmatism-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat mondar-mandir antara politik riil dan moralisme. Esensi realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasionalnya. Sebaliknya, legalisme-moralisme menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta nilai-nilainya, nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari kebesaran bangsa, berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis di dalam dan luar negeri (Glen, 1997, pp. 28-34).

Secara teoritis pada konteks politik luar negeri Amerika Serikat dalam menjalin hubungan dengan negara lain di dunia untuk mencapai kepentingan nasional (Amerika dan Dunia), terdapat empat *framework* utama. Empat *framework* itu singkatnya dikenal sebagai kerangka kerja politik luar negeri Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional, yang terdiri dari *power*, *peace*, *prosperity*, dan *principles* (G., 2007, p. 8). Penjelasan ketiga komponen tersebut sebagai berikut:

a). Power (Kekuatan)

Power adalah syarat utama dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menguasai dunia, pertahanan diri, dan pemeliharaan kemerdekaan dan teritorial nasional. Power mutlak ini diperlukan untuk mencegah terjadinya agresi dan penting untuk menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. Power merupakan kunci utama untuk memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan yang kredibel. Power memungkinkan aktor untuk membentuk sesuai dengan refleksi kepentingannya. Power juga memungkinkan AS untuk memelihara keamanan, menangkis dan menaklukkan setiap ancaman terhadap keamanan negara. Power bisa mendesak justifikasi penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks power, Amerika Serikat masih menggunakan pendekatan pandangan-pandangan realis. Melihat konsekuensi dari hal ini, terdapat empat poin utama dari konteks Power ini: 1). Negara mengejar kepentingan-kepentingan, tidak untuk perdamaian. Kontes ini yang membangun perilaku AS dalam menjalankan politik luar negerinya. Amerika tidak segan untuk mengumandangkan perang dengan pihak lain jika merasa kepentingannya terganggu. AS lebih memiliha untuk melakukan tindakan agresi, perang dan tindakan koersif semacamnya dengan alasan dan seruan untuk menciptakan perdamaian (G., 2007, p. 9).

2). Politik dan kekuasaan militer adalah hal utama yang harus diedarkan. Bagi AS usaha untuk mempertahankan keamanan lebih penting dari pada hanya sekadar upaya pemeliharaan keamanan. Artinya AS lebih cenderung menggunakan strategi-strategi

yang defensif ketimbang deterren. 3). Kekuasaan ekonomi dan aspek-aspek kemakmuran lainnya menjadi nilai penting bagi kekuasaan militer. Ekonomi AS telah membuat dan menjadikan AS sangat kuat sebagai pesaing utama dalam kancah global. Hal itu karena didukung oleh berbagai penemuan dan inovasi teknologi. Keadaan itu telah membuat AS menjadi aktor utama dalam penguasaan teknologi mutakhir dunia. Selain itu untuk menjaga kondisi demikian, diperlukan dukungan yang penuh dari aspek politik, di mana sebagai bentuk komitmennya alokasi dana pertahanan di AS adalah yang terbesar di dunia. 4). Meskipun prinsip-prinsip seperti demokrasi dan hak asasi adalah penting, namun tetap harus mendukung penuh eksistensi power.

b). *Peace* (Perdamaian)

Peace secara filosofis dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan untuk apa power diamankan. Secara prinsip, AS memosisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Dahl ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika. Untuk mewujudkan *peace*, AS tidak segan-segan untuk mengumandangkan perang. Dalam politik luar negeri AS ini lebih dikenal dengan istilah “perang untuk mengakhiri perang.”

c) *Prosperity* (Kemakmuran)

Politik luar negeri AS, utamanya dimotifasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam motivasi ini, terdapat beberapa kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika, diantaranya: kebijakan-kebijakan untuk membantu menurunkan tarif impor dalam hubungan

dagangnya dengan negara lain, menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika Serikat, Penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi AS, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik.

d). *Principles (Prinsip)*

Tujuan politik luar negeri Amerika yang terakhir adalah Prinsip. Prinsip meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Untuk prinsip ini, politik luar negeri AS utamanya untuk menyebarkan akar-akar idealisme demokrasinya ke seluruh dunia. Oleh para pemikir AS yang melahirkan demokrasi seperti Thomas Jefferson, hanya bentuk pemerintahan republik yang demokratis yang menghargai hak asasi manusia, berarti demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang perlu dijaga dan dikembangkan di dunia. Dalam konteks ini, tindakan politik luar negeri Amerika Serikat tidak hanya dilepaskan dari upaya penyebarluasan prinsip-prinsip negaranya ke seluruh dunia.

Keempat prinsip dalam tataran teoritis inilah yang menjadi landasan bagi para pemimpin Amerika dalam menjalankan politik atau kebijakan luar negerinya dan menjalin hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain di dunia. Meskipun kebijakan yang diambil masing-masing presiden dikemas dengan tampilan yang beragama sesuai selera, akan tetapi pada dasarnya politik luar negeri AS tidak jauh dari keempat prinsip tersebut (G., 2007, p. 15). Dan melihat pola-pola dan prinsip-prinsip di atas, Politik Luar Negeri (*Polugri*) Amerika Serikat memang sangat fleksibel, kadang lentur kadang keras, tergantung situasi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan. Dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, juga bisa dibaca dari

siapa yang menjadi kepala negaranya, dan siapa saja yang duduk di birokrat atau sekeliling sang eksekutif.

1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politik, geografis, dan budaya merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Selain merupakan tempat kelahiran dan pusat spiritual agama Islam, Kristen, dan Yahudi (agama Samawi), tanah Timur Tengah juga menyimpan cadangan minyak mentah dalam jumlah besar. Di sisi lain, Timur Tengah adalah kawasan panas atau berbahaya karena menjadi pusran konflik berkepanjangan yang terus menyala di kawasan padang pasir tersebut. Mak hal inilah yang membuat beberapa negara termasuk Amerika Serikat terpesona akan keunikan, kekayaan minyaknya, memanfaatkan konfliknya untuk menancapkan kepentingan kepentingannya.

Kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah tentu tidak jauh dari kepentingan domestik, dan kepentingan global untuk menguasai Timur Tengah baik secara ekonomis, politis, maupun strategis. Maka dari itu kemudian, demi menjaga kepentingan-kepentingannya, AS tidak segan berbuat sekenanya jika ada batu sandungan yang berani macam-macam. Dengan pengaruh yang cukup besar Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan bebarapa resolusi, mulai dari kecaman, pengerahan pasukan multi-nasional, blokade ekonomi, sampai persetujuan penggunaan militer, yang bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dalam menjaga kelangsungan kepentingannya di Timur Tengah, Amerika Serikat juga berkeinginan untuk menata kembali stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian konflik purba Arab-Israel, karena konflik ini adalah merupakan kunci pokok

bagi perdamaian dan stabilitas keamanan Timur Tengah. Timur Tengah memang semakin penting bagi Amerika Serikat, karena sekarang negara sekutu Amerika Serikat (Eropa Barat dan Jepang) semakin tergantung terhadap minyak Timur Tengah, yakni sekitar 80 persen dari kebutuhan minyak mereka. pentingnya minyak bagi negara-negara di luar kawasan telah menyebabkan negara-negara industri tersebut memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara Timur Tengah. Oleh karenanya stabilitas Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjamin kelancaran lalu lintas suplai minyak dari kawasan tersebut. Karena kalau kawasan tandus itu selalu berkonflik, maka akan mengancam kepentingan-kepentingan mereka di Timur Tengah.

Di sisi lain, konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menimbulkan dampak-dampak stabilitas dalam negeri dan juga ke negara-negara lain yang melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah. Efek nyatanya adalah embargo minyak yang dilakukan orang-orang Arab terhadap negara-negara Barat kalau missal mereka mendukung Israel. Embargo itu kemudian menyebabkan kelumpuhan industri negara-negara maju sampai keterlibatan Amerika Serikat dengan Islam: seperti Komunis, kebangkitan Islam bukan hanya sebuah gerakan dakwah (*Proselytising*) tapi juga gerakan untuk mengubah (*Revisionist*). Orang Amerika Serikat menganggap kebangkitan Islam ini sebagai sebuah kekuatan yang *Atavistic* dan militan yang didorong oleh kebencian terhadap pemikiran-pemikiran politik Barat, mengajak kembali ke medan permusuhan sepanjang zaman melawan Kristen (Eisner, 1992).

a). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada Era Perang Dingin (1945-1990)

Negara adidaya Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan Liberal-Kapitalis yang

tentu mempunyai pengaruh yang luas, terhadap setiap negara-negara di dunia, termasuk ketika Perang Dingin yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia (PD) II. Saat Perang Dingin II, Amerika Serikat memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk memenangkan perang melawan Uni Soviet. Salah satu strategi mereka yakni memberi pinjaman-pinjaman lunak terhadap berbagai di negara Eropa, Asia, tetapi tidak untuk kawasan Timur Tengah. Timur Tengah kurang diperhatikan di masa kepemimpinan Presiden Truman. Yang nampak kebijakan AS di Timur Tengah waktu itu adalah pengakuan secara *de facto* terhadap berdirinya Negara Yahudi yaitu Negara Israel. Bagi Truman kebijakan ini merupakan kepentingan Amerika yang tidak hanya mengutamakan keselamatan Israel tetapi juga kepentingan akan minyak dan keunggulan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika membangun koalisi dengan Israel, karena untuk megghambat penyebaran ideologi Komunisme yang disebar oleh mantan sekutunya dalam Perang Dunia kedua, dan Amerika juga membutuhkan sekutu yang dapat dijadikan akses menuju wilayah Timur Tengah.

Namun di masa kepemimpinan Dwight Eisen Hower, AS mulai mengubah kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Hower menganggap bahwa Timur Tengah adalah wilayah yang musti diperhatikan karena letak geografisnya yang strategis dan akibat nasionalisasi terusan Suez oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang diikuti oleh Suriah dnegan memotong jalur pipanya sehingga membuat Inggris bergantung kepada Amerika untuk menggantikan kerugiannya di Timur Tengah. Doktrin mereka juga meminta otorisasi untuk menggunakan pasukan AS guna menghadapi genjatan Soviet dan Komunis Internasional dengan mengamankan dan melindungi integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara Timur Tengah yang meminta bantuan untuk melawan agresi bersenjata dari negara manapun yang dikendalikan Komunisme Internasional.

Di lain cerita, Presiden Jimmy Carter memiliki pendekatan berbeda yang digunakan terhadap kawasan Timur Tengah, yaitu dengan lebih menekankan permasalahan lokal di wilayah padang pasir tersebut dibandingkan dengan permasalahan konflik Timur Tengah dan Barat, dan lebih menekankan hubungan politis daripada masalah militer maupun keamanan (Greene, 2010). Di babak kedua pada masa Carter, posisi Amerika di Timur Tengah terpengaruhi oleh trauma yang diakibatkan oleh peristiwa pada tahun 1979 yang di mana terjadinya Revolusi di Teheran dan Soviet yang melakukan invasi ke Afganistan. Banyak rakyat AS berfikir bahwa revolusi tersebut yang berkontribusi terhadap perkiraan berlebihan AS terhadap keotoriteran yang represif. Di tahun 1980 Carter membuat pernyataan persatuan yang menggarisbawahi pendekatan yang digunakan dalam kerangka kerjasama keamanan negara-negara Timur Tengah melawan Uni Soviet, tujuannya untuk melindungi kepentingan Amerika di Timur Tengah terutama dikarenakan AS sangat bergantung pada suplai minyak dari Timur Tengah.

Setelah Carter, AS dipimpin oleh Ronald Reagan pada tahun 1981. Reagan dan AS memiliki kepentingan yang konsisten di Timur Tengah bahkan Timur Tengah dijadikan fokus utama dalam beberapa tahun belakangan, tidak hanya karena wilayah tersebut secara konflik dan perhatiannya meningkat, tetapi menjadi tempat terjadinya krisis internasional sehingga hal itu diharapkan bisa mengatur secara keseluruhan dinamika politik luar negeri AS (J, 1983, p. 370).

b). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Pasca Perang Dingin (1990-2015)

Setelah hancurnya Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, ideologi Komunisme Internasional juga lambat laun hilang dari peradaban. Uni Soviet yang hancur pada 26 Desember 1991, membuat Amerika Serikat menjadi kekuatan *Unipolar* yang tidak tertandingi, sehingga tatanan dunia baru tercipta yang

biasa disebut *New World Order*. Amerika Serikat mulai meninjau ulang strategi-strateginya dalam rangka untuk mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya dan sebagai negara paling berpengaruh di muka bumi, strategi tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang bernama *National Security Strategy* atau yang disingkat NSS. Doktrin yang dikeluarkan di masa Presiden Bush tersebut bertujuan untuk mempertahankan kepemimpinan Amerika di dunia, Menerapkan strategi *pre-emptive attack* terhadap ancaman potensial bagi keamanan AS dan terakhir untuk mempromosikan prinsip Demokrasi Liberal yang merupakan sistem pemerintahan yang digunakan di Amerika Serikat.

Kita bisa lihat saat ini, AS berkeinginan besar untuk menunjukkan bahwa mereka pelindung dunia dan pemimpin nomor wahid, yakni keterlibatan mereka yang juga mengintervensi serangan Irak ke Kuwait atau yang juga disebut Perang Teluk I. Waktu itu AS mengirimkan pasukan militernya yang diberi nama *Operation Dessert Storm*, dengan Irak menempatkan 300.000 pasukannya di Kuwait berhasil menguasai wilayah Kuwait dengan mudah dan berhasil menguasai suplai minyak dunia hingga 20% waktu itu. Akhirnya Irak kalah setelah dipukul mundur oleh pasukan AS dan Koalisi. Hal tersebut kemudian memantapkan AS untuk mewujudkan tatanan dunia yang baru dengan Amerika sebagai pemimpin tunggal di dunia.

Amerika Serikat juga menggunakan Politik Standar Ganda, hal ini bertujuan untuk melancarkan kepentingan mereka di Timur Tengah, salah satunya untuk tidak memaksa Arab Saudi untuk menggunakan sistem demokrasi. Tujuannya karena Saudi adalah sekutu paling dekat setelah Israel, sehingga dengan mudah mencengkramkan kepentingan-kepentingannya di Timur Tengah (Jatmika, 2000).

Di masa kepemimpinan Barrack Obama politik luar negeri AS lebih lunak dan mengampunayakan perdamaian dan

perdamaian. Ia lebih menekankan konsep *Smart Power* ketimbang *Hard Power* yang digunakan presiden sebelumnya, Bush Senior dan Junior. Konsep *Smart Power* dan *Soft Power* ini merupakan perpaduan antara *Hard Power* dan *Soft Power*, istilah *Smart Power* ini merujuk dari “*Foreign Affairs*” pada tahun 2004 (Nossel, 2006). Obama juga melakukan langkah lain dengan mengurangi jumlah pasukan di Afganistan yang sebelumnya diterjunkan oleh Presiden Bush dengan kebijakan *War on Terror* nya pasca pengeboman 11 September 2001 di gedung WTC yang memakan korban sangat banyak. Tetapi kebijakan lunak Obama tersebut, dalam konflik Suriah Obama punya strategi lain yang diawali dengan peristiwa Arab Spring. Yang mengejutkan adalah tidak hanya karena dukungan AS, tetapi seluruh negara-negara Arab yang menganut sistem Monarki Absolut dijatuhkan oleh rakyatnya yang mendukung pemerintah yang lebih demokratis.

Lalu sikap AS terhadap Suriah tidak lepas dari hubungan antara AS dengan Suriah itu sendiri, di mana di bawah mandat Bashar al-Assad yang pada saat itu memburuk dikarenakan invasi yang dilakukan oleh AS terhadap Afganistan dan Irak dalam kebijakan *War on Terror* era Presiden Bush, Suriah ikut membantu Irak dalam melawan AS. Selain itu Suriah juga masuk ke dalam daftar *Axis of Evil* yang mana dipercayai telah mendukung terorisme di AS sejak 1979 yang diterbitkan oleh NSC (National Security Council) directive-17 pada Desember 2002 (State, 2014). Sejak melutusnya konflik di pertengahan 2011, Suriah telah babak belur dan ratusan ribu orang meninggal dunia akibat perang yang tak kunjung berkesudahan tersebut. Sampai bulan dari Maret 2011 hingga bulan Agustus 2016, jumlah korban meninggal dunia mencapai 301.781 jiwa, korban dari warga sipil terdiri dari 15.099 anak dan 10.018 wanita. Sementara yang mengungsi sebanyak 2,4 juta jiwa dan ¼ di antara pengungsi tersebut adalah anak-anak dan perempuan, sekitar 4 juta warga Suriah kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah (BBCIndonesia, 2017).

c). Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Era Presiden Donald Trump

Saat kampanye kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump berjanji mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya telah dirintis oleh Barack Obama. Indikasinya terlihat dari tiga hal: Janji kampanye Trump, pernyataan politiknya, dan figur calon menteri luar negeri pilihannya, Rex Tillerson. Hal ini jika dilihat lebih jauh lagi, pertimbangan perubahan arah politik luar negeri di era Donald Trump lebih menggunakan Pragmatisme ekonomi-politik, ini terjadi karena latar belakang Trump sebagai pengusaha dan paradigma politiknya yang ultrakonservatif (Republik). Trump tentu akan banyak mengukur sekaligus “membarter” orientasi politik dengan kepentingan penguatan sosio-ekonomi AS.

Di Timur Tengah, disadari atau tidak Trump berhadapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menjadi entitas politik baru dengan kekuatan dan pengaruh yang meningkat drastis di kawasan tersebut, terutama setelah kiprah politiknya di Suriah. Sejauh ini, Trump menunjukkan indikasi “berjodoh” Putin. Menlu AS, Tillerson juga bersahabat dengan Putin. Akan tetapi hal itu cuma di permukaan saja, karena Trump tidak ingin energi ekonomi-politik AS habis untuk meladani rivalitas dengan Rusia dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Apalagi anggota aliansinya AS di Timur Tengah, Negara Teluk dan Eropa, telah mengalami kemerosotan ekonomi dan politik yang parah dalam kurun beberapa tahun terakhir, terutama tiba-tiba Turki berpindah haluan menuju Rusia.

Di bawah kepemimpinannya Donald Trump yang baru saja menjabat presiden AS, ia telah menolak menyatakan bahwa Iran mematuhi persyaratan Rencana Aksi bersama

Komprehensif (JCPOA): Kesepakatan antara Teheran dan kekuatan dunia, yang menginginkan agar Iran setuju membatasi program nuklirnya dengan imbalan pemulihan sanksi. Akan tetapi Donald Trump telah membebaskan sanksi nuklir terhadap Iran “untuk yang terakhir kalinya”, demi menjaga kesepakatan, setidaknya untuk saat ini. Di tempat lain, ketika kuartet Arab yang terdiri atas Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Donald Trump yang awalnya memberikan dukungan persetujuan, tapi akhirnya tiba-tiba ia mengubah keputusannya, dan meminta negara-negara tersebut menyelesaikan sengketa secara diplomatis (PikiranRakyat, 2018).

Sementara itu, beberapa ahli juga menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat Donald Trump dapat mengacaukan kawasan Timur Tengah. Analisis dari Al-Jazeera 2017, mengatakan bahwa akan terjadi tiga krisis diplomatik lebih mencolok dari sebelum-sebelumnya. Dan kasus terbaru adalah Donald Trump tiba-tiba mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan telah memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada akhir tahun 2017, dan Kedubes AS telah diresmikan pada pertengahan tahun 2018. Di luar konflik Palestina dan Israel, Donald Trump juga ikut andil dalam krisis yang melanda Dewan Kerjasama Negara-negara Arab di Teluk. Hal itu dimulai setelah kunjungannya ke Arab Saudi pada Bulan Mei 2017 (PikiranRakyat, 2018).

Dalam laporan yang ditulis Muhammad Abdullah Azzam di laman www.aa.com (12/08/2018), terdapat beberapa kebijakan kontroversial Donald Donald Trump selama dua tahun menjabat Presiden Amerika Serikat. Berikut hasil laporannya:

a). Tidak Mengakui Lembaga dan Perjanjian Internasional

Sejak awal menjabat hingga sekarang, Trump mendapatkan kritikan sebagai “pemimpin yang tidak mengakui lembaga dan perjanjian internasional” karena telah menarik AS secara sepihak dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Perjanjian Iklim Paris, Perjanjian Trans-Atlantik Perdagangan dan Investasi Kemitraan (TTIP). Kakhir ebijakan yang paling dari Trump adalah menarik AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran. "Trump tak ingin bekerja sama dengan sekutu AS. Hal tersebut dapat Anda lihat dengan jelas dalam keputusan Trump terkait Yerusalem dan Iran,” ungkap Koordinator Yayasan Penelitian Politik, Ekonomi dan Sosial (SETA cabang Washington) Kadir Ustun kepada Anadolu Agency. Ustun mengatakan bahwa Trump tidak ingin bekerja sama dengan sekutu maupun pesaing mereka. Pendekatan Trump yang melihat kekuatan ekonomi AS sebagai senjata yang dapat digunakan untuk melawan setiap negara, termasuk sekutu-sekutunya, mendorong AS terjerumus ke dalam perasingan tidak sehat di ranah internasional.

b). AS Tinggal Sendiri dalam Keputusan Mengakui Yerusalem

Dalam kebijakan luar negeri AS, Trump mengadopsi pendekatan yang menganggap Israel sebagai sahabat utamanya dan menjadikan Iran sebagai musuh utamanya. Hampir seluruh dunia, kecuali Israel dan beberapa negara pulau, menentang langkah Trump yang mengabaikan keberadaan "Palestina" dan mengakui "Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Langkah Trump itu juga telah mengabaikan semua perundingan damai di Timur Tengah. Rancangan resolusi di PBB untuk menentang langkah Trump terkait Yerusalem disetujui dengan 128 suara melawan 9 suara tidak setuju. Resolusi tersebut telah diadopsi PBB, walaupun Trump mengancam “akan memotong bantuan ekonomi”. Resolusi PBB yang didukung oleh hampir semua negara Uni Eropa itu mengakibatkan Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall,

Mikronesia, Nauru, Togo, dan Palau terasingkan dari arena global.

Dengan demikian, di bawah pimpinan Trump, pemerintahan Washington tak hanya melawan dunia Islam, namun mereka juga telah berhadapan dengan hampir seluruh dunia kecuali Israel. Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu telah mengeluarkan AS dari perannya dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah. Wakil Presiden AS Mike Pence selama dua kali kunjungan ke Timur Tengah, dalam masa jabatannya, tidak pernah bertemu dengan pejabat Palestina dan pulang ke negaranya dengan tangan kosong. Kondisi seperti ini adalah ambang kritis bagi legitimasi diplomatik AS di kawasan itu. Karena peran mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah melenyap secara perlahan.

c). AS Berpisah dengan Uni Eropa Soal Iran

Dalam hal penarikan diri dari kesepakatan nuklir Iran, Amerika Serikat pimpinan Trump, mendapatkan kritikan serta tidak mendapatkan dukungan internasional kecuali dari Israel. Hal tersebut tercatat pertama kali sepanjang sejarah AS. Pada tanggal 8 Mei 2018, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya telah menarik diri secara sepihak dari perjanjian internasional. Keputusan AS tersebut menuai kritikan keras dari para pemangku kepentingan lainnya dalam perjanjian tersebut, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok dan Jerman. Pemerintah Trump telah mengabaikan seruan negara-negara Uni Eropa untuk "membicarakan kembali perjanjian itu". Pemerintah Trump telah mengeluarkan kebijakan sebagai "rezim sanksi sepihak" melalui dua paket sanksi terhadap Iran yang akan diterapkan pada Agustus dan November.

d). PBB dan Nato Tidak Nyaman

Amerika Serikat yang terasingkan di PBB, memilih menggunakan metode "hukuman ekonomi" dengan memotong anggaran yang disisihkan untuk PBB sebesar USD285 juta, serta memotong sumber dana Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dana Populasi PBB (UNFPA). Metode ini tidak akan bermanfaat, terlihat dalam kasus pemberlakuan sanksi terhadap Irak pada masa Saddam Husein di bawah payung PBB: Penggunaan ekonomi sebagai "alat untuk mendidik", hanya akan meningkatkan reaksi penentangan masyarakat itu terhadap mereka yang menerapkan sanksi tersebut. Sikap pendekatan Trump yang selalu mengatakan "kami telah memberikan banyak uang, yang lain juga sama harus memberikan uang yang banyak" menjadikan persekutuan NATO sebagai operasi komersial, yang menyebabkan ketidaknyamanan serius di antara anggota NATO. Sama halnya dalam PBB, Trump mendapatkan kritikan karena bertindak sebagai manajer perusahaan yang memprioritaskan kepentingan ekonomi harian AS daripada mementingkan semangat aliansi internasional di NATO.

e). Kredibilitas AS Telah Berkurang Banyak

Jacob Kirkegaard, seorang pakar ekonomi senior dari *Peterson Institute for International Economic* berpusat di Washington, menekankan bahwa kredibilitas Amerika Serikat telah berkurang selama pemerintahan Trump. Kirkegaard menjelaskan kepada Anadolu Agency bahwa Trump menggunakan pajak perdagangan dan bea cukai sebagai alat kebijakan luar negeri dan dia menyebut politik itu sebagai kebijakan "American First". Tidak ada satu pun negara, kata Kirkegaard, yang akan menerima perkataan Trump dan bahkan komitmennya dalam perjanjian internasional. "Sebab sebagian besar kredibilitas AS telah berkurang akibat seorang presiden yang selalu berubah dan jauh dari gagasan kuat tersebut," ujar dia. "Dunia kecewa terhadap kepemimpinan

Amerika. Saya memperingatkan kepada siapa yang akan membuat perjanjian dengan Trump, karena besok pagi saat Trump bangun dia akan menarik diri dari perjanjian tersebut,” ungkap Kirkegaard. Trump tampaknya tidak suka dengan perjanjian internasional yang sudah dirundingkan pada masa sebelumnya, dia ingin bertindak sebagai playmaker yang hanya mementingkan wilayah AS. Akibat langkah penambahan pajak pada baja-aluminium atas dalih untuk menjaga "keamanan nasional" pemerintah Trump secara bersamaan telah merugikan saingan dan sekutunya. Mereka juga telah merugikan semua produsen dalam jangka pendek dan menengah. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama negara-negara Uni Eropa dan Turki menilai AS telah bergerak sepihak dan merusak norma-norma internasional secara serius.

Banyak pakar ekonomi di AS mengungkapkan bahwa pendekatan Trump tersebut akan menyebabkan kerugian signifikan pada perusahaan dan konsumen AS dalam jangka menengah, dan tak mudah untuk membangun kembali neraca perdagangan internasional yang akan memburuk dalam periode ini. Paul Krugman, pakar ekonomi dan penulis AS terkenal dari New York Times, menulis artikel pada 31 Mei silam terkait perang perdagangan yang dimulai Trump dengan judul "Betapa bodohnya perang perdagangan - sedikit tidak stabil juga". "Perang perdagangan ini akan membunuh lapangan kerja di Amerika," ujar Krugman sembari menguraikan kekeliruan-kekeliruan Trump dalam ekonomi.

f). Perang Perdagangan dengan Tiongkok

AS sedang menghadapi perang ekonomi yang semakin memanas dengan Tiongkok yang memutuskan untuk menambahkan pajak masuk terhadap baja dan aluminium. Tindakan ini pun direspons Tiongkok dengan menaikkan tarif impor 128 barang produksi AS sebanyak 15 hingga 25 persen pada awal bulan April lalu. Pada waktu yang bersamaan,

Gedung Putih menyatakan bahwa Tiongkok harus membayar 25 persen pajak impor tambahan pada produk mereka yang bernilai lebih dari USD50 miliar lantaran kegiatan ilegal dalam merebut teknologi perusahaan-perusahaan AS. Tiongkok pun kembali membalas dengan menaikkan 25 persen tarif terhadap 659 produk dari AS senilai 50 miliar dolar. Pada tanggal 18 Juni, Trump menginstruksikan bahwa tambahan tarif senilai USD200 miliar akan diterapkan apabila Tiongkok menanggapi tarif yang telah diumumkan sebelumnya dengan pembalasan balik.

Pada 7 Juli, AS secara resmi menaikkan tarif impor 800 produk bernilai USD34 miliar yang diimpor dari Tiongkok sebanyak 25 persen. Pemerintah Tiongkok menyatakan, meskipun Trump mengeluarkan berbagai ancaman, kenaikan tarif terhadap produk-produk AS akan segera diterapkan. Tirai baru pada hubungan AS-Tiongkok akan dibuka pada 23 Agustus mendatang. Beijing mengumumkan akan mulai menerapkan kenaikan tarif terhadap AS bersamaan dengan AS yang akan mengaplikasikan gelombang pajak kedua terhadap Tiongkok. Li Fuyi dari Institut Penelitian Ekonomi Makro Tiongkok dalam analisisnya mengenai pengaruh perang perdagangan terhadap ekonomi dunia yang disiarkan di Radio Internasional Tiongkok menyebutkan bahwa Tiongkok adalah lawan ekonomi AS yang berbeda dari lawan-lawan yang ada sebelumnya.

Menurut Fuyi, pada 50 tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) Uni Soviet disusul oleh Jepang lalu AS telah melampaui 60 persen. Sejak saat itu Washington mulai memulai perang ekonomi dengan negara-negara tersebut. Fuyi juga mengatakan bahwa meskipun AS dapat membatasi Tokyo dan Moskow, Beijing memiliki kekuatan yang lebih besar dalam sistem keuangan internasional keuangan pada saat ini.

g). Alternatif Selain AS

Ketika perkembangan-perkembangan ini berlangsung, alternatif lain dengan kekuatan yang beragam mulai bermunculan dan semakin jelas bahwa AS bukanlah satu-satunya alternatif untuk sistem dunia. Ketika Trump semakin memperbesar perang dagang dengan Tiongkok dan Uni Eropa. Rusia dan Tiongkok akan melakukan hubungan dagang dengan lebih banyak menggunakan Yuan Tiongkok dibanding dolar Amerika. Iran yang tengah mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan sanksi ekonomi AS juga telah mengambil langkah-langkah baru untuk membangun persatuan perdagangan dan politik dengan Tiongkok dan India.

Demikian pula, penangguhan bantuan keamanan senilai USD255 juta ke Pakistan telah mendorong negara ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok dan India. Pemerintahan Trump dengan memutuskan penambahan pajak kepada baja dan aluminium atas alasan keamanan nasional kemudian memberi sanksi kepada Turki lantaran penahanan pastor Andrew Brunson, yang ternyata langkah tersebut telah berkontribusi besar dalam pemulihan hubungan Ankara-Moskow.

2. Resolusi Amerika Serikat Serta PBB Atas Konflik Israel-Palestina

Status Amerika Serikat terhadap konflik Israel dan Palestina memang sangat sentral karena AS sebagai juru damai dunia yang selalu mengkampanyekan perdamaian dan perdamaian, termasuk kampanye damai atas Israel dan Palestina. Amerika Serikat termasuk bagian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga perdamaian dunia, khususnya di Lembaga Dewan Keamanan PBB. Maka dari itu kemudian, PBB membutuhkan peran anggota-anggotanya di

Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia.

Seperti dijabarkan di atas, perhatian Amerika Serikat terhadap Timur Tengah khususnya Israel, Palestina dan Yerusalem karena di daerah itu menjadi ladang pertumbuhan darah yang mau tidak mau harus segera diselesaikan. Sejak Peang Dunia II hingga berakhirnya Perang Dingin, haluan politik luar negeri AS ke Timur Tengah semakin bertambah, dan fokus utamanya adalah untuk menancapkan kepentingan-kepentingannya di Timur Tengah, termasuk di Yerusalem. Perhatian Amerika Serikat atas konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina bisa dilihat dalam keterlibatannya dalam berbagai resolusi-resolusi yang dicetuskan PBB lewan Dewan Keamanan mereka. Seperti resolusi No. 181 tahun 1947, No. 242 tahun 1967, No. 338 tahun 1973 dan resolusi dewan keamanan No. 694 tahun 1991.

Secara jelas tentang resolusi dan penyelesaian konflik Israel-Palestina oleh PBB dijabarkan lengkap oleh wartawan senior Kompas Trias Kunchayono dalam bukunya: *Jerusalem, Kesucian, dan Pengadilan Akhir* (2014) menjabarkan bahwa ada beberapa resolusi-resolusi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut:

***Pertama:* Resolusi-resolusi yang diterbitkan Majelis Umum PBB**

1. Resolusi diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1967:

Menyusul keputusan Israel mengenai aneksasi Israel atas wilayah-wilayah Arab Jerusalem, Pakistan mengajukan rancangan resolusi yang disetujui dengan suara bulat oleh 99 negara anggota dan 20 abstain.

Berikut ini teks lengkapnya:

Majelis Umum:

Dengan keprihatinan yang mendalam berkaitan dengan situasi umum di Jerusalem sebagai hasil dari serangkaian langkah yang diambil oleh Israel untuk mengubah status kota. Yang isinya adalah: memandang bahwa langkah-langkah itu tidak sah. Menyerukan pada Israel untuk menghentikan semua langkah yang sudah diambil dan dengan segera menghentikan setiap tindakan yang akan mengubah status Jerusalem. Dan terakhir meminta Sekretariat Jenderal untuk melaporkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan mengenai situasi dan penerapan resolusi ini tidak lebih dari satu minggu setelah resolusi diterbitkan

2. Resolusi diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1967

Majelis Umum:

Setelah menerima laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, menarik kembali resolusinya 2253, yang diterbitkan pada 04 Juli 1967. Memberikan catatan dengan penyelesaian dan keprihatinan yang sangat mendalam atas tidak dipenuhinya resolusi 2253 oleh Israel. Yang isinya adalah: Menyesalkan kegagalan Israel melaksanakan resolusi Majelis Umum nomor 2253. Menegaskan kembali seruannya kepada Israel, seperti yang tertuang dalam resolusi, yakni agar menghentikan semua langkah yang sudah diambil dan dengan segera menghentikan setiap tindakan yang akan mengubah status Jerusalem.

***Kedua:* Resolusi yang diterbitkan Dewan Keamanan**

1. Resolusi Nomor 162, diterbitkan pada tanggal 11 April 1961

Dewan Keamanan:

Meminta para anggota Komisi Gencatan Senjata untuk bekerja sama sehingga menjamin bahwa Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Yordania akan ditaati.

2. Resolusi Nomor 242, diterbitkan pada tanggal 22 November 1967

Dewan Keamanan:

Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk di Timur Tengah. Menekankan penolakan terhadap pencaplokan wilayah dengan cara perang dan mendorong perlunya usaha perdamaian yang adil dan langgeng di mana setiap Negara dapat hidup dengan aman. Dan menekankan lebih lanjut bahwa semua Negara anggota yang mengakui Piagam PBB berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan Pasal 2 Piagam tersebut.

1. Menegaskan bahwa pelaksanaan pokok-pokok Piagam PBB membutuhkan perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah, yang mencakup penerapan asas-asas berikut ini: i) penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik akhir-akhir ini. ii) diakhirinya semua klaim atau keadaan perang; dihormati dan diakuiinya kekuasaan, integritas wilayah dan politik setiap Negara di Timur Tengah, hak mereka untuk hidup aman di wilayah perbatasan yang diakui, yang bebas dari ancaman maupun pengerahan kekuatan.

2. Menegaskan lebih lanjut perlunya:

i) menjamin kebebasan berlayar melalui jalur internasional di wilayah Timur Tengah.

ii) Memiliki permukiman yang adil, dalam masalah pengungsi;

iii) Menjamin perbatasan wilayah yang tidak diganggu gugat dan adanya kemerdekaan politik bagi setiap Negara di Timur Tengah, melalui penerapan zona demiliterisasi.

3. Meminta Sekjen PBB menunjukkan Wakil Khusus di Timur Tengah untuk melakukan kontak terus-menerus dengan Negara-negara di wilayah tersebut, sehingga dapat mempromosikan kesepakatan dan membantu usaha-usaha penyelesaian yang damai dan dapat diterima semua pihak, sesuai dengan ketentuan dan asas-asas resolusi ini.

4. Meminta Sekjen PBB untuk melaporkan pada Dewan Keamanan tentang kemajuan yang dicapai oleh Wakil Khusus sesegera mungkin.

2. Resolusi Nomor 250, diterbitkan pada tanggal 27 April 1968

Dewan Keamanan:

Setelah mendengar pernyataan dari para wakil Yordania dan Israel. Dan setelah mempertimbangkan bahwa kepada Wakil Tetap Israel di PBB. Mempertimbangkan bahwa dengan mengadakan parade militer di Jerusalem akan meningkatkan ketegangan di wilayah itu dan berakibat merugikan terhadap penyelesaian masalah-masalah di wilayah tersebut secara damai. 1). Menyerukan pada Israel agar menahan diri untuk tidak melakukan parade militer di Jerusalem yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1968. 2). Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan

resolusi ini. 3). Resolusi Nomor 252, diterbitkan pada tanggal 21 Mei 1968.

Dewan Keamanan:

Menarik kembali Resolusi Majelis Umum (Nomor 2253) yang diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1967 dan Resolusi Nomor 2254 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1967. Setelah mempertimbangkan surat yang dikirim Wakil Tetap Yordania mengenai situasi Jerusalem, dan laporan Sekretaris Jenderal. Setelah memperhatikan bahwa sejak diadopsi resolusi-resolusi yang disebutkan di atas, Israel telah mengambil langkah lebih jauh dan bertindak bertentangan dengan resolusi-resolusi itu. Mengingat perlunya bekerja untuk menciptakan perdamaian yang adil dan badai. Menegaskan lagi bahwa penambahan wilayah lewat penaklukan militer tidak dapat diterima.

- 1). Menyesalkan kegagalan Israel memenuhi resolusi-resolusi Majelis Umum seperti disebutkan di atas.
- 2). Mempertimbangkan bahwa seluruh langkah legislative dan administrative dan tindakan yang diambil Israel, termasuk pencaplokan tanah dan properti-properti yang ada di sana, yang cenderung mengubah status itu.
- 3). Dengan mendesak menyerukan pada Israel untuk menghentikan semua langkah seperti yang sudah diambil dan menghentikan dengan segera semua langkah yang cenderung mengubah status Jerusalem.
- 4). Meminta pada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan resolusi-resolusi yang ada.
- 5). Resolusi Nomor 267, diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1969

Dewan Keamanan:

Menarik kembali Resolusi 252 yang diterbitkan 21 Mei 1968 dan resolusi sebelumnya yang dikeluarkan Majelis Umum yakni Resolusi 2253 dan 2254 yang diterbitkan pada tanggal 4 dan 14 Juli 1967, secara berturut-turut, mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukakan oleh Israel yang berakibat terhadap status kota Jerusalem.

Menegaskan kembali prinsip yang telah ditetapkan yakni bahwa pengembalian wilayah secara militer tidak dapat diterima. 1). Menegaskan kembali resolusi nomor 252 (1968). 2). Menyesalkan kegagalan Israel untuk memperlihatkan penghormatannya terhadap resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan yang sudah disebut di atas. 3). Mencela dengan keras semua langkah yang telah diambil untuk mengubah status kota Jerusalem. 4). Menegaskan bahwa semua langkah legislative dan administrative dan tindakan yang diambil oleh Israel yang bertujuan mengubah status Jerusalem, termasuk pencaplokan tanah dan properti-propertinya, adalah tidak sah dan tidak dapat mengubah status. 5). Dengan mendesak sekali lagi menyerukan pada Israel agar dengan segera menghentikan semua langkah yang telah diambil yang dengan tindakan itu dimaksudkan untuk mengubah status kota Jerusalem, dan di masa depan menahan diri supaya jangan melakukan semua tindakan yang berakibat mengubah status kota Jerusalem. 6). Meminta pada Israel agar tidak menunda-nunda waktu lagi memberitahukan kepada Dewan Keamanan berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari resolusi. 7). Memutuskan bahwa jika ada tanggapan negative atau tidak ada tanggapan dari Israel. Dewan Keamanan tanpa mengulur-ulur waktu akan berkumpul kembali (bersidang) untuk mempertimbangkan bahwa langkah lebih lanjut perlu diambil dalam masalah ini. 8). Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan resolusi yang ada.

5. Resolusi Nomor 271, diterbitkan pada tanggal 15 September 1969

Dewan Keamanan:

Perhatian terhadap kerusakan yang demikian paran Masjid Suci Al Aqsha di Jerusalem, di wilayah pendudukan militer Israel, karena secara sengaja pada tanggal 21 Agustus 1969, dibakar. Sadar akan konsekuensi hilangnya budaya umat manusia. Setelah mendengar pernyataan-pernyataan yang disampaikan di hadapan sidang yang mencerminkan perasaan sakit hati masyarakat internasional karena pelanggaran terhadap suatu hal yang dianggap keamat, suci, di salah satu tempat ibadah yang sangat dimuliakan umat manusia.

Menarik kembali secara berturut-turut Resolusi Nomor 252, yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 1968, dan 267 (1969) yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 1969 dan resolusi-resolusi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Majelis Umum yakni Resolusi Nomor 2253 dan 2254 yang diterbitkan pada tanggal 04 dan 14 Juli 1967, berkait dengan langkah-langkah dan tindakan-tindakan Israel yang berakibat terhadap status kota Jerusalem.

Menegaskan kembali prinsip yang telah ditetapkan bahwa pengambilalihan wilayah lewat cara-cara militer tidak dapat diterima. 1). Menegaskan kembali resolusi yakni Nomor 252 (1968) dan 267 (1969). 2). Mengakui bahwa setiap tindakan perusakan atau pencemaran Tempat-tempat Suci, bangunan-bangunan keagamaan dan situs-situs di Jerusalem atau setiap desakan akan, atau kerja sama secara diam-diam untuk melakukan tindakan tertentu mungkin secara sungguh-sungguh membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 3). Memutuskan bahwa tindakan yang keterlauan yakni penajisan dan pencemaran Masjid Suci Al Aqsha menegaskan perlunya diambil langkah segera untuk menghentikan Israel melanggar resolusi-resolusi tersebut di

atas dan menghentikan dengan secara semua langkah dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah status Jerusalem. 4). Menyerukan pada Israel agar secara teliti melihat lagi ketentuan-ketentuan konvensi-konvensi umum dan Hukum Internasional yang mengatur pendudukan militer dan menahan diri supaya jangan menghalangi pelaksanaan fungsi-fungsi Majelis Muslim Tertinggi Jerusalem yang telah ditetapkan, termasuk keja sama, yang mungkin diinginkan oleh Majelis, dengan Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan dengan komunitas Muslim berkaitan dengan rencananya untuk memelihara dan memperbaiki tempat-tempat suci Islam di Jerusalem. 5). Mengecam kegagalan Jerusalem melaksanakan resolusi-resolusi yang sudah disebut di atas dan menyerukan Israel agar segera melaksanakan ketentuan-ketentuan dari resolusi-resolusi itu. 6). Menegaskan ketetapan di alenia 7 dari Resolusi 767 (1969), sekiranya ada tanggapan negative atau tidak ada tanggapan, Dewan Keamanan tidak perlu menunda-nunda waktu agar menggelar sidang untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut apa yang semestinya diambil berkait dengan masalah ini. 7). Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan dengan teliti resolusi-resolusi yang sudah ada dan melaporkan kepada Dewan Keamanan pada waktu sesegera mungkin.

6. Resolusi diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 1980

Dengan menerbitkan Resolusi 476 (1980) yang didukung oleh 14 suara dan tidak ada satupun yang menentang, sementara 1 abstain (Amerika Serikat). Dewan menegaskan kembali bahwa semua langkah yang mengubah karakter geografik, demografik, dan sejarah dan status Jerusalem dibatalkan dan tidak berlaku serta harus disahkan secara hukum.

Sementara itu resolusi-resolusi nyata yang detuskan sendiri oleh Amerika Serikat, yakni seperti Perjanjian Perdamaian Camp David I (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Perjanjian Oslo II (1995), Perundingan Hebron (1997), Perjanjian Wye River I (1998), Perjanjian Wye River II (1999), Perjanjian Camp David II (2000), Konferensi Annapolis (2007), dan Konsep Petan Jalan Damai (*Road Map*) yang semuanya bertujuan untuk perdamaian Israel dengan Palestina atau *Two State Solution* (Solusi Dua Negara) secara khusus.

3. Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Yerusalem dari Setiap Presidennya

Ada banyak kebijakan yang telah dibuat Amerika Serikat tentang Status Kota Yerusalem dan masa depan Kota tempat tiga agama besar tersebut. Berikut peneliti akan menjabarkan beberapa kebijakan Amerika Serikat terhadap Kota Yerusalem dari setiap presiden Amerika Serikat saat berkuasa, dimulai dari tahun 1950-an hingga tahun 2018. Peneliti mengambil sumber data dari Jewish Virtual Library (A Project of Aige) yang diakses pada 10 Desember 2018, (Library, 2017):

a). Kebijakan AS Tentang Yerusalem: Oposisi yang Digerakkan untuk Memengaruhi Kementerian Luar Negeri Israel ke Yerusalem (28 Juli 1953, Saat Presiden Dwight Eisenhower)

Pernyataan oleh Sekretaris Negara Amerika: Amerika Serikat menyesalkan bahwa Pemerintah Israel telah memutuskan untuk memindahkan Kantor Asingnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kami telah memberitahukan keinginan pemerintahan AS tentang hal itu kepada Pemerintah Israel pada dua kesempatan sebelumnya. Itu dilakukan pada bulan Juli 1952

dan lagi pada bulan Maret 1953, ketika Duta Besar kita, mendengar desas-desus bahwa ini dalam kontemplasi, meminta Pemerintah Israel dan juga meminta mereka untuk tidak memindahkan Departemen Luar Negeri mereka ke Yerusalem. Kami merasa percaya bahwa itu akan mempermalukan PBB, yang memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan status masa depan Yerusalem. Anda mungkin ingat bahwa resolusi PBB saat ini tentang Jerusalem merenungkan bahwa itu seharusnya untuk sebagian besar setidaknya sebuah kota internasional. Dan kami merasa bahwa tindakan khusus oleh Pemerintah Israel pada waktu ini tidak tepat sehubungan dengan ketegangan yang ada di Timur Tengah, ketegangan yang sangat ekstrim, dan jika kebijakan itu diimplementasikan maka akan menambah kekauan. Pandangan-pandangan yang kami ungkapkan di sini, memberi tahu kepada pemerintah lain dari berbagai negara agar memiliki kepedulian terhadap pengembangan atmosfer perdamaian dan niat baik di Yerusalem.

Kami telah memberi tahu Pemerintah Israel bahwa kami tidak berniat memindahkan Kedutaan kami sendiri ke Yerusalem.

Sumber: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

b). Kebijakan AS Tentang Yerusalem: Pernyataan Tentang Penyimpanan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv (3 November 1954, Saat Dwight Eisenhower)

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat:

Perwakilan diplomatik Yordania, Lebanon, Irak, Yaman, Arab Saudi, Libya, Suriah, dan Mesir mengimbau Sekretaris negaranya masing-masing pada tanggal 3 November 1954 untuk memberitahukan pandangan-pandangan mereka sehubungan dengan rencana untuk menghadirkan kredensial di Yerusalem. Waktu itu Duta Besar Amerika untuk

Israel adalah Edward B. Lawson. Dalam percakapan itu, Sekretaris mengingatkan kembali kebijakan Pemerintah AS untuk melihat ke PBB sebagai tumpuan utama yang bertanggungjawab dalam menentukan status masa depan Yerusalem. Setelah praktik normal, presentasi kredensial akan dilakukan oleh Duta Besar Lawson di tempat di mana Kepala Negara sebenarnya berada. Fakta bahwa ini berarti bahwa presentasi akan berlangsung di Yerusalem menyiratkan tidak ada perubahan dalam sikap kita mengenai Yerusalem, dan juga tidak menyiratkan perubahan apa pun di lokasi Kedutaan Besar Amerika di Israel, yang ada di Tel Aviv.

Sumber: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

c). Kebijakan AS Tentang Jerusalem: Memorandum, Mengusik Bangsa Dari Mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel (31 Mei 1962, Saat Presiden John Kennedy)

Pada tanggal 21 Mei 1962, pemerintah Amerika Serikat menghubungi Asisten Sekretaris Mr. Feldman yang intinya mengungkapkan mengapa pemerintah lain tidak setuju atas pembentukan kedutaan di Yerusalem, karena kami meninjau posisi Amerika Serikat tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah riskan. Lihat saja Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada 29 November 1947, yang disediakan untuk pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi dan pembentukan korpus separatum (zona internasional), di bawah administrasi internasional langsung, Kota Yerusalem dan sekitarnya. Akan tetapi Resolusi ini tidak dapat dilakukan karena permusuhan pecah pada Mei 1948 antara negara-negara Arab dan Israel. Permusuhan kemudian dihentikan oleh serangkaian perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949. Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Yordania terjadi pada 3 April 1949, membentuk garis demarkasi gencatan senjata yang membagi Yerusalem menjadi sektor-sektor di bawah Israel dan

Yordania untuk mengontrol tanah tak bertuan di antara keduanya. Sedangkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1949, menegaskan kembali rekomendasinya bahwa korpus separatum dibentuk, dan meminta Dewan Perwalian untuk melanjutkan dengan menyusun Statuta untuk Corpus Separatum Yerusalem. Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang tertarik tidak mendukung resolusi ini, yang, bagaimanapun, disahkan oleh Majelis.

Terlepas dari berlalunya resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949, Pemerintah Israel secara resmi memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem. Menteri Israel mulai pindah ke kota, tetapi Kementerian Luar Negeri tetap di Tel Aviv selama beberapa waktu. Pada tanggal 4 Mei 1952, Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka memindahkan Kantor Luar Negeri ke Yerusalem. Transfer yang sebenarnya terjadi pada 12 Juli 1953. Pada tanggal 9 Juli 1952, Kedutaan Besar di Tel Aviv menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Israel (terlampir) / 2 / menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak melihat transfer yang menguntungkan. Kantor Luar Negeri Israel ke Yerusalem, dan bahwa tidak ada niat untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Posisi kami, seperti yang sering dinyatakan, adalah: "status Yerusalem adalah masalah keprihatinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak ada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil tindakan apa pun untuk merugikan kepentingan PBB dalam masalah ini. Tujuan kami adalah mempertahankan Yerusalem. pertanyaan yang terbuka dan untuk mencegahnya diselesaikan semata-mata melalui proses atrisi dan fait accompli dengan mengesampingkan kepentingan internasional dan akhirnya ekspresi akhir daripadanya mungkin melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, ketika Departemen mengetahui bahwa pemerintah untuk pertama kalinya sedang memikirkan pembentukan misi diplomatik di Israel, kami menginformasikan bahwa pemerintah latar belakang sejarah dari sikap PBB terhadap Jerusalem dan menyatakan harapan bahwa, dalam penghormatan terhadap sikap PBB, misinya akan didirikan di Tel Aviv, di mana sebagian besar misi lainnya berada. (Pendekatan ini hampir tidak berubah, meskipun kami tidak akan melakukannya dalam kasus pemerintah yang bermusuhan dengan Amerika Serikat karena upaya kami mungkin merugikan diri sendiri). Jika, misalnya ada nasihat ramah kami, pemerintah ingin mendirikan misinya di Yerusalem, Pemerintah Amerika Serikat tidak berusaha lagi untuk mencegahnya. Pandangan sekutu utama kita tentang masalah Yerusalem umumnya mirip dengan kita sendiri. Mereka juga kadang-kadang membuat pernyataan kepada negara-negara lain mengenai pembentukan misi diplomatik di Yerusalem.

Berkas-berkas Departemen menunjukkan bahwa sejak pemindahan ibukotanya ke Yerusalem, Israel telah membuat pendekatan di sepanjang garis-garis di atas ke negara-negara berikut: Misi Jepang 1955 di Tel Aviv, Misi Guatemala 1955 di Yerusalem, Misi Kuba 1957 di Tel Aviv, Misi Liberia 1958 di Tel Aviv, Haiti 1958 tidak ada perwakilan diplomatik penduduk, Misi Venezuela 1959 di Yerusalem, Misi Ekuador 1960 belum terbentuk, Misi Ivory Coast 1961 di Yerusalem, Misi Ethiopia 1961 belum ditetapkan, Misi Filipina 1962 belum ditetapkan, Misi Kosta Rika 1962 belum ditetapkan (tetapi diumumkan sebagai Yerusalem), Misi Gabon 1962 di Yerusalem. Kemudian pada Maret 1962, dari 41 negara yang mempertahankan misi diplomatik di Israel, sebelas di antaranya terletak di Yerusalem, empat di antaranya, berpenduduk Besar. 3/6 Kelompok ini mencakup enam negara Afrika dan tiga negara Amerika Latin. Dua lainnya adalah Yunani dan Belanda, yang keduanya dianggap menghormati status Yerusalem karena pemerintah-pemerintah ini menunjuk

perwakilan konsuler mereka untuk mengamankan Yerusalem sebagai perwakilan diplomatik ke Negara Israel yang baru dibentuk, meninggalkan tempat tinggal konsuler mereka di lokasi asli. Praktik Amerika Serikat (menginformasikan negara-negara yang mungkin mempertimbangkan pembentukan misi diplomatik di Israel dengan latar belakang kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa) diketahui oleh Israel. Yang terakhir ini kadang-kadang mengambil masalah dengan praktek, paling akhir bulan Januari tahun ini. Kami selalu menjawab bahwa Amerika Serikat merasa memiliki kewajiban moral dalam masalah ini; bahwa kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah yang sah; pada premis ini kami membuat pandangan kami diketahui oleh pemerintah; akan tetapi, setiap pemerintah harus memutuskan posisinya untuk dirinya sendiri.

**d). Kebijakan AS Tentang Jerusalem:
Memorandum Tentang Kebijakan AS (7 Februari 1963,
Saat Presiden John Kennedy)**

Pertemuan ini dilakukan oleh Shaul Bar-Haim (penasehat Kedubes Israel) dan William R. Crawford Jr dan perwakilah UNP Stephen J. Campbell dan yang membahas tentang Kedutaan Besar Israel dan membahas posisi AS tentang status Yerusalem. Crawford mengingat percakapan antara Asisten Sekretaris Talbot dan Duta Besar Harman pada 17 Juli 1962, di mana Talbot mengatakan bahwa kami tidak akan lagi mengambil inisiatif dalam menyampaikan pandangan kami tentang status Yerusalem kepada pemerintah yang merenungkan awal pembentukan misi diplomatik di Israel. Dalam mendeskripsikan batas-batas konsesi ini, Mr. Talbot mengatakan kami tidak akan menyetujui desakan Israel pada penerbitan visa atau konsuler exequatur yang akan menghambat kebebasan bergerak dari Perwira Konsuler AS dalam korpus separatum, atau dalam gerakan Israel lainnya yang kami akan lakukan. Pandangan seperti mengikis pendirian kami pada prinsipnya tentang status Yerusalem.

Selanjutnya, Mr. Crawford ingat bahwa Kedutaan Besar Israel telah mengambil pengecualian yang kuat terhadap referensi kami terhadap korpus separatum. Pertukaran ini kemudian memimpin Kedutaan Besar Israel, dalam percakapan antara Mr. Bar-Haim dan Mr. Crawford pada tanggal 06 Agustus 1962, yang meminta persetujuan kami atas formulasi rekapitulasi sendiri dari posisi AS. Kami menjawab bahwa kami ingin merujuk formulasi Israel kepada petugas di Departemen dengan pengalaman panjang tentang masalah ini. Mr Crawford mengatakan penelitian ini sekarang telah selesai, dan komentar kami pada formulasi Israel dibuktikan dalam revisi berikut ini:

1. Pemerintah Israel dapat mengambil petunjuknya dalam menafsirkan posisi Amerika Serikat di Jerusalem, seperti pernah terjadi pada pada 9 Juli 1952, dan pidato Sekretaris Dulles pada 1 Juni 1953 dan 26 Agustus 1955.

2. Dalam resolusi PBB mengenai pembagian Palestina, Resolusi 181 (II) dan dalam rancangan resolusi Swedia-Belanda yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Umum. Berbagai solusi itu untuk melindungi kepentingan PBB di Yerusalem ditetapkan, tetapi di kedua Resolusi 181 dan draft Swedia-Belanda, wilayah geografis Yerusalem adalah sama; yaitu, seperti yang didefinisikan dalam Resolusi 181. Sikap Departemen menunjukkan untuk sementara waktu Pemerintah Amerika Serikat membuka pikiran terbuka mengenai jenis pengaturan yang mungkin dibuat untuk daerah tersebut dan untuk memuaskan minat masyarakat internasional di dalamnya, Dan batas-batas geografi wilayah ini adalah sebagaimana diatur dalam Resolusi 181. AS percaya bahwa pengaturan apa pun yang dibuat harus memiliki persetujuan Israel dan Yordania, dan mayoritas yang diperlukan dari Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Penggunaan Mr. Talbot untuk istilah corpus separatum pada 17 Juli hanya mengacu pada definisi geografis ini.)

3. Pandangan dasar AS ini mengenai definisi geografis dari wilayah tersebut juga menggambarkan area yurisdiksi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem.

Crawford kemudian menekankan bahwa posisi dasar AS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 1. Ayat 2 harus dianggap sebagai "komentar informal dan amplifikasi saat ini". Mengenai Paragraf 3, kami tidak berbeda pendapat dengan formulasi Israel yang disediakan Israel mengakui bahwa istilah *corpus separatum* sebenarnya menggambarkan wilayah yurisdiksi Konsulat Jenderal AS di Yerusalem. Sebagai catatan kaki untuk Paragraf 3, kami akan menunjukkan bahwa wilayah yurisdiksi Konsulat Jenderal mencakup wilayah-wilayah di Yordania yang melebihi dan di atas area yang ditentukan oleh Resolusi 181. Crawford menambahkan kalau Israel akan mencatat bahwa hal yang disebutkan sebelumnya tidak melibatkan perubahan dalam posisi AS yang lama di Yerusalem. Ini adalah perasaan kami bahwa Israel membuat gunung dari sarang tikus dalam memperebutkan penggunaan Talpot dari istilah *corpus separatum*. Kami melihat tidak ada keuntungan dalam membuka kembali diskusi tentang posisi AS, tetapi merasa kami tidak boleh menghindari komentar ketika Kedutaan Besar Israel berusaha untuk merumuskan posisi kami untuk kami.

Sumber: Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, 1961-1963: Timur Dekat, 1962-1963, V. XVIII. DC: GPO, 2000.

e). Kongres Vs Timur Tengah: Resolusi dan Dukungan untuk Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (24 April 1990, Saat Presiden George H. W. Bush)

Dari awal aneksasi ke wilayah Palestina, Israel mengatakan kalau Yerusalem sebagai ibukotanya. Padahal dari tahun 1948 hingga 1967 Yerusalem adalah kota yang terbagi dan warga Israel dari semua agama tidak diizinkan mengakses

situs-situs suci di daerah yang dikuasai Yordania. Karena sejak 1967 Yerusalem telah menjadi kota persatuan yang dikelola oleh Israel dan orang-orang dari semua agama beragama telah dijamin akses penuh ke tempat-tempat suci di dalam kota. Dan Presiden dan Sekretaris Negara di Amerika Serikat telah menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, dan mereka telah bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan itu.

Sementara pernyataan ambigu oleh Pemerintah Amerika Serikat mengenai hak orang Yahudi untuk tinggal di semua bagian Yerusalem menimbulkan kekhawatiran di Israel bahwa suatu hari nanti Yerusalem akan dibubarkan dan akses ke situs keagamaan di Yerusalem ditolak untuk warga Israel, dan pencarian untuk perdamaian abadi di wilayah ini. Oleh karena itu, problem ini bisa terselesaikan oleh DPR (Senat concurring), atau Kongres di Amerika Serikat sendiri. Dan mereka pernah membuat kebijakan seperti:

- (1) mengakui bahwa Yerusalem adalah dan harus tetap menjadi ibu kota Negara Israel.
- (2) sangat yakin bahwa Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi, di mana hak-hak setiap kelompok agama etnis dilindungi.
- (3) menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pencarian perdamaian untuk mempertahankan upaya kuat mereka untuk membawa negosiasi antara Israel dan perwakilan Palestina.

f). Kongres dan Timur Tengah: Resolusi Memperingati HUT ke-30 dan Reunifikasi Yerusalem (10 Juni 1997, Saat Presiden Bill Clinton)

Disadari atau tidak, selama 3.000 tahun lebih Yerusalem telah menjadi titik pusat dari pengabdian agama

Yahudi, Sedangkan Yerusalem saat ini juga dianggap sebagai kota suci oleh anggota agama Kristen dan Muslim. Dan kehadiran bangsa Yahudi ke Yerusalem selama tiga milenium terakhir terjadi di sejak 1840-an; Bahwa mayoritas Yahudi yang pernah berkembang di Kota Tua Yerusalem, juga pernah diusir dengan paksa selama Perang Arab-Israel 1948. Sedangkan dari 1948 hingga 1967 Yerusalem adalah kota yang terbagi dan warga Israel dari semua agama serta warga Yahudi dari semua negara bagian ditolak akses ke tempat-tempat suci di daerah yang dikuasai Yordania.

Sedangkan pada tahun 1967 Yerusalem dipersatukan kembali oleh Israel selama konflik yang dikenal sebagai Perang Enam Hari, Padahal sejak 1967 Yerusalem telah menjadi kota persatuan, dan orang-orang dari semua agama agama telah dijamin akses penuh ke tempat-tempat suci di dalam kota; Padahal tahun ini menandai tahun ke-30 bahwa Yerusalem telah dikelola sebagai kota yang bersatu di mana hak-hak semua agama telah dihormati dan dilindungi. Sedangkan pada tahun 1990, Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara besar-besaran mengadopsi Resolusi Serentak Senat 106 dan Resolusi Serentak Rumah 290 yang menyatakan bahwa Yerusalem, ibu kota Israel, harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi 'dan menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk melakukan negosiasi untuk menyelesaikannya. perbedaan mereka.

Sementara Perdana Menteri Yitzhak Rabin dari Israel kemudian mengutip Resolusi Seratus Senat 106 sebagai "membantu tetangga kita mencapai meja perundingan" untuk menghasilkan Deklarasi Prinsip-prinsip bersejarah tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Interim, yang ditandatangani di Washington, D.C. pada 13 September 1993. Sedangkan untuk Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 (Hukum Publik 104-45), yang menjadi undang-undang pada 8 November 1995, menyatakan kebijakan Amerika Serikat

tentang Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terpecah: Sekarang, oleh karena itu, jadilah itu

Dalam rapat Kongres dan beberapa wakil dari Timur Tengah, menghasilkan beberapa mandat yang isinya:

(1) memberi selamat kepada penduduk Yerusalem dan orang-orang Israel pada saat ulang tahun ke 30 reunifikasi kota bersejarah itu.

(2) sangat percaya bahwa Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi di mana hak-hak setiap suku dan agama dilindungi oleh mereka selama 30 tahun terakhir.

(3) menyerukan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk menegaskan secara terbuka sebagai masalah kebijakan Amerika Serikat bahwa Yerusalem harus tetap menjadi Ibu Kota Negara Israel yang tak terbagi; dan

(4) mendesak pejabat Amerika Serikat untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang bertentangan dengan kebijakan ini.

g). Kebijakan AS tentang Jerusalem: Bill Veto Clinton Memperkuat Posisi AS di Yerusalem (November 1999, Saat Presiden Bill Clinton)

Pada bulan Oktober tahun 2000, Presiden Clinton memveto RUU Pengeluaran Perdagangan Keadilan-FY2000, dan mengomentari dalam pesan veto pada dua "ketentuan Yerusalem" dalam RUU tersebut. Disisipkan oleh Senator Ernest Hollings [D-SC], dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan bahwa dokumen resmi pemerintah AS merujuk ke Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mewajibkan Konsulat AS di Yerusalem untuk melapor ke Kedutaan di Tel Aviv, daripada langsung ke Departemen Luar Negeri di Washington.

Presiden Clinton menulis bahwa "RUU itu mencakup sejumlah ketentuan mengenai pelaksanaan urusan luar negeri yang menimbulkan masalah konstitusional yang serius. Ketentuan mengenai Yerusalem tidak dapat diterima berdasarkan kebijakan konstitusional, luar negeri, dan alasan operasional. Tindakan yang diserukan oleh ketentuan-ketentuan ini akan merugikan hasilnya. negosiasi status permanen Israel-Palestina, yang baru-baru ini dimulai dan yang para pihak berkomitmen untuk mengakhiri dalam satu tahun."

h). Kebijakan AS tentang Yerusalem: Kongres Menyerukan Pengakuan yang Lebih Jelas tentang Yerusalem sebagai Ibukota Israel (30 September 2002, Saat Presiden George W, Bush)

Undang-Undang Otoritas Hubungan Luar Negeri (H.R. 1646), yang ditandatangani oleh Presiden Bush, termasuk ketentuan-ketentuan berikut:

Kongres mempertahankan komitmennya untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem dan mendesak Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem tahun 1995, untuk segera memulai proses relokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem. Tidak ada dana yang dapat dihabiskan untuk konsulat AS di Yerusalem, yang sebagian besar berurusan dengan masalah Palestina, sampai pos itu berada di bawah pengawasan duta besar AS untuk Israel. Saat ini, Konsul Jenderal AS di Yerusalem melapor langsung ke Departemen Luar Negeri.

Semua negara daftar dokumen federal dan ibukota mereka harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Warga Amerika yang lahir di Yerusalem dapat menuntut bahwa dokumen yang dikeluarkan pemerintah AS, seperti paspor dan akta kelahiran, mengidentifikasi Israel sebagai tempat kelahiran mereka. Menteri Luar Negeri akan

melaporkan kepada Kongres dalam waktu 60 hari tentang upaya AS untuk memastikan dan mempromosikan partisipasi penuh Israel dalam komunitas diplomatik dunia. Gedung Putih kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menganggap ketentuan ini tidak mengikat dan bahwa pemerintah tidak akan menerapkannya. Resolusi itu, Presiden Bush mengatakan, "akan, jika ditafsirkan sebagai mandatori daripada sebagai penasihat, secara tidak mungkin mengganggu otoritas konstitusional presiden untuk merumuskan posisi Amerika Serikat, berbicara untuk negara dalam urusan internasional, dan menentukan syarat-syarat pengakuan itu, diberikan kepada negara asing." Presiden kemudian menandatangani undang-undang untuk mendapatkan dana untuk Departemen Luar Negeri dan mengklaim ketentuan Yerusalem adalah "nasihat tidak wajib." Pemerintah menyatakan bahwa Yerusalem adalah "masalah status permanen" yang harus diselesaikan antara Palestina dan Israel.

i). Kongres & Timur Tengah: Jerusalem Embassy Relocation Act (24 Oktober 1995, Saat Presiden Bill Clinton)

Pada bulan Oktober 1995, Senat (93-5) dan Kongres (374-37) mengadopsi S.1322- yakni Undang-Undang Relokasi Kedutaan Yerusalem. Isi dari undang-undang tersebut bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan mengingat beberapa resolusi Kongres sebelumnya yang menyerukan agar kota tetap bersatu. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Yerusalem yang harus tetap menjadi kota bersatu, harus diakui sebagai ibu kota Negara Israel dan bahwa Kedutaan Besar AS harus dipindahkan ke sana dari Tel Aviv selambat-lambatnya 31 Mei 1999. Kemudian ada kebijakan dan ketentuan kalau presiden tidak mengeksekusi RUU tersebut maka presiden mengeluarkan surat pernyataan setiap enam bulan untuk menjaga kedutaan di Tel Aviv. Dan melaporkan kepada Kongres bahwa langkah seperti itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.

Seperti Presiden Barack Obama pernah mengeluarkan pembebasan terakhirnya mencegah langkah itu selama pemerintahannya pada 1 Desember 2016. Bahkan Presiden Donald Trump juga pernah menandatangani surat pengabaian dan relokasi RUU Jerusalem Embassy Act.

Sejak 1999 setiap Presiden AS seperti Clinton, Bush dan Obama, telah menggunakan pengabaian untuk menanggihkan relokasi Kedutaan pada interval enam bulan, contoh salinannya kurang lebih seperti di bawah ini:

Memorandum Presiden –

Penangguhan Keterbatasan Di Bawah Undang-undang Kedutaan Yerusalem

SUBJECT: Penangguhan Keterbatasan di bawah UU Kedutaan Yerusalem

Sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada saya sebagai Presiden oleh Konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat, termasuk bagian 7 (a) dari Undang-Undang Kedutaan Yerusalem tahun 1995 (Hukum Publik 104-45) ("Undang-undang"), saya dengan ini menentukan bahwa perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, untuk menanggihkan untuk jangka waktu 6 bulan batasan-batasan yang ditetapkan dalam bagian 3 (b) dan 7 (b) dari Undang-Undang. Anda diberi wewenang dan diarahkan untuk mengirimkan tekad ini kepada Kongres, disertai dengan laporan sesuai dengan bagian 7 (a) dari Undang-Undang, dan untuk mempublikasikan penentuan dalam Daftar Federal. Penangguhan ini akan berlaku setelah transmisi penentuan ini dan melapor ke Kongres.

k). Opini Publik Amerika Jajak Pendapat: Sikap Seputar Jerusalem (23 Oktober 2011, Saat Presiden Obama)

Polling Opini Publik Amerika:

Salah satu bidang perselisihan yang paling signifikan antara Israel dan Palestina adalah pembangunan perumahan Israel di kota Yerusalem. Manakah dari pernyataan berikut yang paling dekat dengan tampilan Anda sendiri? (ADL, 23 Oktober 2011):

"Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa Israel harus segera menghentikan semua konstruksi di daerah-daerah yang masih dalam sengketa, termasuk permukiman yang disengketakan di Yerusalem."	29%
"Para pemimpin Israel mengatakan bahwa Yerusalem adalah –dan akan selalu menjadi— ibu kota Israel, dan mereka memiliki hak untuk membangun perumahan di ibu kota negara mereka."	54%

Haruskah Yerusalem tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi atau haruskah Amerika Serikat memaksa Israel untuk memberikan bagian-bagian dari Yerusalem, termasuk situs-situs suci Kristen dan Yahudi, kepada Otoritas Palestina? (Analisis Media Review Independen, September 2011):

	September 2011
Tetap tidak terbagi	70.9%
Paksa / berikan bagian	9.4%
Tidak tahu / menolak	19.7%

Apakah Anda percaya bahwa Yerusalem harus sepenuhnya berada di bawah kendali Israel atau bahwa Yerusalem harus dibagi antara Israel dan Palestina? (Proyek Israel):

	Maret 2008	Juni 2011
Di bawah kendali Israel	55%	50%
Terbagi	32%	43%

Menurut Anda, mana dari hal berikut yang merupakan alasan paling kuat bagi Yerusalem untuk tetap tidak terbagi di bawah kendali Israel? (The Israel Project, Juni 2011):

Orang Kristen, Palestina, dan Arab Israel memiliki hak yang sama untuk hidup di Yerusalem sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Semua agama dilindungi di bawah kendali Israel.	47%
Tidak ada garis yang mudah untuk memisahkan Yerusalem. Yahudi tinggal di satu blok, orang Arab lain, dan beberapa blok bercampur. Saluran pembuangan, air dan jaringan listrik semuanya dibagi dan dipelihara oleh Israel untuk semua penduduk.	24%
Orang Yahudi telah tinggal di Yerusalem kembali hampir 3.000 tahun dan kehidupan Yahudi di Yerusalem adalah mentioend di Perjanjian Lama 656 kali.	17%

Haruskah Yerusalem tetap sebagai ibu Israel yang tak terbagi dalam perjanjian damai dengan Palestina? (McLaughlin & Associates, Oktober 2010):

Yes	50.9%
No	20.4%

Tidak tahu / Menolak untuk menjawab	28.7%
-------------------------------------	-------

Seperti yang Anda ketahui, perselisihan kunci antara Israel dan Palestina adalah tentang wilayah-wilayah tertentu di Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak perang tahun 1967. Negosiasi masa lalu atas perjanjian damai telah gagal karena kedua belah pihak ingin mengendalikan bidang-bidang ini. Hanya berdasarkan apa yang Anda ketahui, apakah Anda lebih cenderung untuk percaya bahwa Israel harus memiliki kontrol, Palestina harus memiliki kontrol, atau bahwa kedua belah pihak harus memungkinkan PBB untuk memiliki kontrol kecuali mereka kemudian datang ke kompromi lain? (PIPA, 8 Mei 2002):

Orang Israel harus memiliki kendali	26%
Palestina harus memiliki kendali	7%
PBB harus memiliki kendali	57%
Abstain	10%

"Israel harus setuju untuk membagi Jerusalem dengan Palestina." Apakah Anda sangat setuju dengan pernyataan ini, agak setuju, agak tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan ini? (Penn, Schoen & Berland Inc., dan First International Resources Inc., 25 Januari dan 17 Februari 2001):

	General Public	Elites	American Jews	Influential Americans
Strongly Agree	21%	25%	11%	0%
Somewhat	30%	28%	22%	0%

Agree				
Samewhat Disagree	16%	18%	10%	0%
Strongly Disagree	25%	19%	51%	0%
Don't Know	9%	11%	6%	0%

D). Administrasi Donald Trump: Pengakuan Yerusalem (6 Desember 2017, Saat Presiden Donald Trump)

Pada 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan bahwa AS akan memulai proses pemindahan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengumuman tersebut menandai awal dari pendekatan baru untuk konflik antara Israel dan Palestina.

Seperti dijelaskan di atas, pada tahun 1995, Kongres mengadopsi UU Kedutaan Yerusalem, mendesak pemerintah federal untuk merelokasi kedutaan Amerika ke Yerusalem dan untuk mengakui bahwa kota itu—dan sangat penting—adalah ibu kota Israel. Tindakan ini disahkan Kongres oleh mayoritas bipartisan yang luar biasa dan ditegaskan kembali oleh suara bulat dari Senat hanya enam bulan yang lalu. Namun, selama lebih dari 20 tahun, setiap presiden Amerika sebelumnya telah menerapkan pengabaian hukum, menolak untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem atau untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden mengeluarkan pembebasan ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan penyebab perdamaian. Ada yang mengatakan mereka tidak memiliki keberanian, tetapi mereka membuat penilaian terbaik berdasarkan fakta saat mereka memahaminya pada saat itu. Namun demikian, catatan sudah masuk. Setelah lebih dari dua dekade keringanan, kita tidak lebih dekat

dengan perjanjian perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina. Adalah bodoh untuk berasumsi bahwa mengulangi rumus yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik.

Donald Trump mengatakan: “Karena itu, saya telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meskipun presiden sebelumnya telah menjadikan ini sebagai janji kampanye besar, mereka gagal mewujudkannya. Hari ini, saya mengantarkan. Saya telah menilai tindakan ini untuk kepentingan Amerika Serikat dan mengejar perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini adalah langkah yang sudah lama ditunggu untuk memajukan proses perdamaian dan bekerja menuju kesepakatan yang langgeng”. Hari ini, kami akhirnya mengakui yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih, atau kurang, dari pengakuan atas kenyataan. Itu juga hal yang benar untuk dilakukan. Itu sesuatu yang harus dilakukan.

Itulah sebabnya, konsisten dengan Undang-undang Kedutaan Yerusalem, saya juga mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan untuk memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini akan segera memulai proses perekrutan arsitek, insinyur, dan perencana, sehingga kedutaan baru, ketika selesai, akan menjadi penghargaan yang luar biasa bagi perdamaian. 70 tahun yang lalu bahwa Amerika Serikat, di bawah Presiden Truman, juga mengakui Negara Israel. Sejak saat itu, Israel telah membuat ibukotanya di kota Yerusalem, ibu kota orang-orang Yahudi yang didirikan pada zaman kuno. Hari ini, Yerusalem adalah pusat pemerintahan modern Israel. Ini adalah rumah parlemen Israel, Knesset, serta Mahkamah Agung Israel. Ini adalah lokasi kediaman resmi Perdana Menteri dan Presiden. Ini adalah markas banyak kementerian pemerintah.

B. *Stamding* Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Kalau merunut secara historisitas dan dalam percaturan politik internasional, Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik terlama di dunia dalam konteks Negara-bangsa modern. Apalagi hingga saat ini kita tidak bisa menutup mata kalau korban kian bertambah banyak, dan banyaknya faktor eskternal yang juga ikut untuk mendamaikan kedua belah pihak (Israel-Palestina), termasuk Negara adidaya Amerika Serikat. Tidak dapat dimungkiri kalau AS sejak awal bibit konflik Israel-Palestina telah melakukan berbagai usaha penyelsaian konflik, terutama pada decade 1990-an.

Berikut beberapa perundingan yang telah dilaksanakan antara Israel dan Palestina melalui jasa mediasi Amerika Serikat dalam sejarahnya, seperti dikutip dari artikel yang ditulis Noorkholis Ridho di www.kompasiana.com (26/06/2015):

a). Perjanjian Oslo I

Perjanjian Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali dengan 14 kali pertemuan diawali sejak 20-22 Januari 1993. Dari perundingan ini dihasilkan suatu kernagak kesepakatan berisi 17 pasal ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklrasi prinsip atau DOP (Declaration of principles on nterim self govermant arrangement).

b). Perundingan Oslo II

Dalam perundingan Taba (Oslo II) pada tanggal 28 September 1995 dimaksudkan memperluas wilayah otonomi Palestina, Israel menunjukkan komitmennya untuk mentaati hasil kesepakatan Oslo I dengan kesediannya untuk mundur dari tujuh kota di Tepi Barat, yakni: Jenon, Tulkarem, Qalqilyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron. Enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak Palestina pada Bulan November dan Desember 1995, kecuali Hebron. Untuk wilayah terakhir ini, pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah pendudukan (area H-1). Sedangkan di seperlima wilayah tersebut (area H-2), pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi para pemukim Yahudi.

c). Perundingan Hebron

Pada masa Netanyahu tercapai persetujuan Hebron pada 15 Januari 1997 yang Israel bersedia menyelesaikan penarikan pasukan selama 10 hari sejak penandatanganan persetujuan. Di samping itu, juga tercapai kesepakatan yang mengharuskan Israel untuk melakukan tiga tahap penarikan pasukannya dari wilayah-wilayah pedesaan Tepi Barat antara Bulan Maret hingga Agustus 1998.

d). Perundingan Wye River I

Perundingan Wye River I merupakan usaha Presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak Desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat

terhenti selama berbulan-bulan. Dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di Wye River I tanggal 23 Oktober 1998. Ketentuan-ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan Oslo II dari protokol Hebron yang belum tuntas diimplementasikan oleh Israel.

e). Perundingan Wye River II

Hasil kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya Ehud Barak. Dalam pertemuan Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum (yang dikenal sebagai memorandum Wye River II) pada tanggal 04 September 1999. Di samping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan dalam Wye River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini juga dijumpai hal-hal baru serta revisi dari sebagian ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi Negara Palestina merdeka sampai September 2000, pembatalan 3% cagar alam di lembah Yordan, dan ketentuan tentang dimulainya perundingan status Final. Kesepakatan ini akan berlaku efektif mulai 10 September 1999.

f). Perundingan Camp David II

Perundingan Palestina-Israel yang berlangsung di Camp David, Maryland-AS, selama 15 hari sejak 11 Juli hingga 25 tahun 2000, sebenarnya lebih didorong oleh sikap tergesa-gesa dan rasa optimisme yang berlebihan teruma dari P.M Ehud Barak dan Presiden Bill Clinton. Munculnya optimisme yang besar dan dialami oleh Ehud dan Bill Clinton tersebut didasari oleh telah tercapainya beberapa alternatif pemecahan tentang isu-isu paling rumit dalam konflik Israel-Palestina, seperti status Kota Yerusalem Timur, masalah pengungsi Palestina, masalah pemukiman Yahudi, pembagian jatah air, dan masalah perbatasan Israel-Palestina. Alternative-alternatif pemecahan masalah itu antara lain adalah draf kesepakatan rahasia Stockholm dan dokumen AS yang akan digunakan sebagai formula pemecahan jalan tengah.

g). Konferensi Annapolis 2007

Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu Negara Kedaulatan Palestina, status final Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.

h). Mediasi Melalui Forum Tripartit

Mediasi atas prakarsa Amerika Serikat ini dijlankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan yaitu: Presiden AS Barack Obama sebagai fasilitator negosiasi langsung, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sebagai wakil dari Israel, dan Mahmoud Abbas sebagai wakil dari ketua otoritas Palestina. Dari beberapa pertemuan yang berhasil terealisasi antara lain adalah: Pengiriman utusan AS sebagai wakil Obama, Pertemuan Obama dan Netanyahu pada tanggal 25 Maret 2010 di Washington, Pertemuan Obama dan Netanyahu pada 10 September 2010 di Gedung Putih.

i). Donal Trump Mengakui Yerusalem Sabagai Ibu Kota Israel 2017

Pada tanggal 06 Desember 2017, presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mendeklarasikan bahwa pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan Donald Trump tersebut disampaikan di Gedung Putih Washington DC, pada Rabu 06 Desember 2017, saat itu di dampingi Wakil Presiden AS Mike Pence. Secara konteks legal-formal pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi Amerika Serikat, akan tetapi pernyataan ini tentu mengandung makna politik yang sangat kuat dan mendalam.

Melihat lembaran-lembaran konflik dan resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat terhadap perdamaian Israel-Palestina, secara historisitas dan realitas, Amerika Serikat memang lebih dekat ke Israel dan selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan Israel ketimbang Palestina. Israel

adalah salah satu aset strategis yang secara dasar-dasar moral harus didukung penuh karena Israel juga penganut demokrasi sekuler dengan gaya hidup Barat. Sejak Israel menjadi sebuah Negara pun, Amerika Serikat telah mendukung sepenuhnya untuk komunitas Yahudi mendirikan sebuah Negara di Timur Tengah. Hal ini kemudian disusul dengan mengakui sepenuhnya (de facto) atas kemerdekaan dan berdirinya Negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948.

Belum lagi ketika banyaknya komunitas Yahudi dan individu-individu yang pro-Israel yang menduduki posisi penting dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat seperti Dewan Keamanan Nasional (NSC), Departemen Luar Negeri, Intelejen bahkan Kongres begitu konsisten mendukung kepentingan Israel. Oleh karena itu, tidak seorang pun kandidat presiden Amerika Serikat dalam politik Israel sangat berpengaruh, dalam banyak hal kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah sangat menggambarkan bagaimana komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai mitra khusus. Dengan status dan kemesraan tersebut, Israel mendapat dukungan sepenuhnya, mulai dari politik, ekonomi dan militer yang luar biasa dari Amerika Serikat.

Untuk konteks saat ini, sejak Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat sejak awal tahun 2017 hingga penghujung tahun 2018, sekutu tradisional AS (Israel) telah menerima bantuan militer sebesar angka \$3,1 miliar dari Washington, dan tahun depan angka itu akan meningkat menjadi \$3,8 miliar di bawah kesepakatan 10 tahun yang disepakati oleh mantan Presiden AS Barack Obama. Setelah dilantiknya Trump, setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan gelontoran bantuan AS yang kian melambung dinilai banyak pihak bahwa Amerika Serikat telah diskriminatif dan rasis terhadap rakyat Palestina karena telah berat sebelah dan mementingkan Israel.

Kita lihat saja, inilah beberapa keputusan penting AS terkait Palestina sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat seperti laporan (Aljazeera.com, 2018):

2017:

16 Februari: Trump membatalkan komitmen jangka panjang AS untuk solusi dua negara, dan mengatakan bahwa dia akan mendukung solusi satu negara setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

24 Maret:

Senat AS menyetujui penunjukan David Friedman—seorang pendukung dan pendonor untuk pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki—sebagai Duta Besar Washington untuk Israel.

6 Desember:

Trump mengumumkan keputusan kontroversial untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.

2018:

3 Januari: Trump mengancam akan memangkas bantuan untuk rakyat Palestina dalam serangkaian unggahan di Twitter, dan mengutip keengganan mereka “untuk berunding damai”.

17 Januari:

Pemerintah AS memangkas lebih dari setengah dana yang direncanakan (\$65 juta dari paket bantuan

sebesar \$125 juta) untuk UNRWA—badan PBB untuk para pengungsi Palestina yang melayani lebih dari lima juta pengungsi terdaftar.

14 Mei:

Kedutaan Besar AS secara resmi dibuka di Yerusalem pada hari yang sama ketika Palestina memperingati 70 tahun sejak Nakba atau “Malapetaka”—pembersihan etnis kota-kota Palestina oleh paramiliter Zionis pada tahun 1948, juga malam ketika negara Israel didirikan.

19 Agustus:

Menantu Trump, Jared Kushner—yang ditugaskan bersama utusan Jason Greenblatt untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang macet pada tahun 2017—memulai tur Timur Tengah untuk membangun dukungan untuk rencana perdamaian Israel-Palestina yang belum diumumkan.

25 Agustus:

AS memangkas bantuan ekonomi sebesar \$200 juta untuk rakyat Palestina, setelah sebelumnya merencanakan untuk menyediakan \$251 juta untuk pemerintahan yang baik, kesehatan, pendidikan, dan pendanaan untuk masyarakat sipil, dalam anggaran tahun 2018 saat ini.

31 Agustus: Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menghentikan semua pendanaan untuk UNRWA setelah menentukan bahwa organisasi tersebut melakukan “operasi cacat yang tidak dapat ditebus”.

9 September:

AS memangkas salah satu program bantuan terakhir yang tersisa (\$25 juta dalam bantuan keuangan) untuk jaringan enam rumah sakit di Yerusalem Timur yang diduduki.

10 September:

AS menutup misi PLO untuk Washington DC, atas penolakan Otoritas Palestina untuk terlibat dalam perundingan dengan Israel yang dipimpin AS.

Maka dari ketimpangan dan ketidakseimbangan ini, yang berat sebelah kepada Israel pada akhirnya peran Amerika Serikat sebagai mediator ulung seolah-olah hanyalah retorika politik yang tidak dibarengi dengan suatu ketegasan agar konflik Israel-Palestina berhasil diselesaikan. Namun kenyataannya Amerika Serikat tetap saja berkeinginan untuk menjadi juru damai negosiasi dan resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Dan yang terpenting *standing* Amerika semakin terancam di dunia internasional karena banyak negara-negara mengancam kebijakan-kebijakan tersebut. Label sebagai juru damai dan pengaman Palestina-Israel bahkan dunia akan terkikis, ketika Amerika sendiri seolah menjadi *security trade* bagi negara-negara lainnya.